

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak pelita I sampai dengan saat ini secara bertahap mulai berubah. Masyarakat sudah mulai meninggalkan struktur agraris dan industri menuju pada masyarakat yang memiliki teknologi tinggi. Semua ini dapat terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat majunya pola pikir manusia yang berdampak pada berkembangnya nilai budaya. Sebenarnya hal tersebut di atas sangat wajar terjadi karena manusia yang dinamis sebagai anggota masyarakat akan terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang muncul sejalan dengan kemajuan teknologi dan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri akibat perubahan yang kita alami menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kompleksitas pola kehidupan dan tuntutan dalam masyarakat menuntut anggota masyarakat harus memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu setiap individu yang ingin tetap bertahan dalam kehidupan masyarakatnya haruslah memiliki kemandirian berwawasan dan berpengetahuan luas, terampil dan profesional serta dapat bertanggungjawab, sebaliknya kekurangmampuan seorang individu akan membawa dampak pada keterbatasan gerak serta interaksi dengan lingkungannya

Pendidikan dalam arti luas, baik di rumah, di sekolah dan atau di masyarakat dapat membentuk dan membina individu manusia seutuhnya, yang serasi, selaras serta seimbang, lahir dan batin. Melalui pendidikanpun seseorang dapat dibina dan dikembangkan hakekat kemanusiannya yaitu menjadi makhluk : (1) individual, (2) sosial, (3) etis dan religius, serta (4) bermoral.

Secara nyata upaya pendidikan selama ini telah berdampak positif bagi perkembangan sebagian individu, pembangunan dan kesejahteraan manusia. Disamping hasil positif tersebut banyak pula out put/lulusan lembaga pendidikan yang kurang berhasil dalam mencapai tujuan pendidikannya. Contohnya, dalam masyarakat kita masih banyak dijumpai individu-individu yang kurang mandiri, kurang terampil, belum matang interaksi sosialnya, kurang percaya diri, kurang memperhatikan moral dan tata nilai pada masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada proses pendidikan masih banyak masalah yang dijumpai, baik yang berkaitan dengan masalah proses belajar mengajar, masalah sosial maupun masalah pribadi yang semua ini membawa dampak dalam pembentukan kualitas manusia. Hal-hal yang demikian terjadi sebagai akibat keterbatasan dan rendahnya kualitas pendidikan yang mereka dapatkan sebelumnya. Selain itu diperkuat pula oleh situasi dan kondisi masyarakat dimana individu tersebut berada.

Guru pembimbing di sekolah dituntut untuk ikut berperan aktif mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah, khususnya pada bidang bimbingan dan konseling. Dalam periode dua dasawarsa terakhir, perubahan tatanan sosial di masyarakat berlangsung dengan cepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi yang sangat cepat menjadi faktor utama munculnya perubahan. Teknologi berkembang, teori-teori ilmiah bertambah, norma sosial berubah, tata nilai bergeser, struktur kemasyarakatan berubah dan orangpun berubah (Russell & Evans, 1992: 1). Pada setiap perubahan akan menciptakan hal baru yang selalu membawa pengaruh serta dampak bagi masyarakatnya.

Dilihat dari segi penanganan di lapangan tugas guru pembimbing di sekolah berada di tingkat SLTP dan SLTA, dimana siswa tersebut berada pada masa remaja. Masa ini merupakan masa transisi, dimana posisi anak sangat sulit dan rumit, mereka bukan lagi anak-anak, tetapi tidak pula orang dewasa (Wrenn 1968: 5), namun mereka adalah individu yang mempunyai karakteristik dan tugas perkembangan tersendiri.

Havighurst (1953: 120) mengemukakan 10 tugas perkembangan masa remaja, yaitu : (a) mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita; (b) mencapai peran sosial sebagai seorang pria dan wanita; (c) menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif; (d) mencapai ketidak tergantungan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya; (e) memperoleh jaminan dan ketidak tergantungan ekonomi; (f) memilih dan mempersiapkan diri untuk hidup berkeluarga; (g) mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab; (h) Mengharapkan dan mencapai perilaku yang bertanggungjawab; (i) memperoleh seperangkat nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku.

Apabila tugas-tugas perkembangan di atas tidak dapat dijalani dengan baik, mereka akan mengalami hambatan dan gangguan untuk memasuki tugas perkembangan pada fase selanjutnya. Keadaan remaja pada periode peralihan, kondisi psikologisnya belum mantap sehingga dengan mudah akan mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Dalam kondisi seperti inilah para remaja membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional.

Bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu layanan dalam rangka pembinaan siswa yang merupakan salah satu upaya untuk membantu mengoptimalkan perkembangan potensi siswa. Rochman Natawidjaja (1990: 16) secara tegas menyatakan bahwa bimbingan konseling mempunyai fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah, yaitu sebagai pendamping fungsi utama sekolah dalam bidang pengajaran dan perkembangan intelektual siswa khususnya menangani masalah sosial pribadi siswa.

Di Indonesia sendiri profesi guru pembimbing sejak pemunculan pertama hingga saat ini berlangsung tanpa gejolak yang berarti, meskipun di satu segi peranan bimbingan dan konseling di sekolah diakui keberadaannya, tetapi di sisi lain profesi guru pembimbing belum dianggap sebagai profesi yang mandiri. Dalam perkembangannya, saat ini tidak dapat kita abaikan kemungkinan imbas dari Amerika juga akan masuk ke Indonesia, karena pada beberapa wilayah kita mendengar komentar-komentar “guru pembimbing di sekolah tidak begitu diperlukan karena tugas-tugasnya sudah dapat digantikan oleh guru kelas”. Dengan kata lain guru pembimbing saat ini tidak profesional. Anggapan di atas dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan indikator

tersebut antara lain : (1) perbandingan antara peranan konselor dan guru bidang studi dalam rangka memberikan pertolongan serta usaha membangkitkan minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya lebih unggul guru bidang studi dibandingkan konselor (Prayitno, 1987). (2) kenyataan lain yang sering kita jumpai di lapangan adalah “performance” guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai profesi, kualifikasi keprofesionalannyapun cukup beragam. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas bimbingan yang diberikannya. (3) keragaman kualifikasi ini dapat kita buktikan bahwa sampai saat ini guru pembimbing yang bertugas di sekolah ada yang memiliki dasar pendidikan D3, S1, bahkan tidak sedikit guru pembimbing yang tidak pernah mengenyam pendidikan di jurusan Bimbingan Konseling atau tidak memiliki pemahaman secara konseptual berkenaan dengan bimbingan konseling. (4) wadah kegiatan profesi bimbingan konseling belum banyak membantu petugas bimbingan di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas keprofesiannya.

Guru pembimbing, proses belajar, sekolah dan masyarakat merupakan komponen-komponen penting dan saling berinteraksi. Dalam menjalankan tugasnya saat ini guru pembimbing dituntut dapat menangani permasalahan secara “integrated” dan profesional. Dalam rangka menilai profesionalisme guru pembimbing, kiranya kita perlu juga mengkaitkan dengan sejarah perkembangan suatu profesi. Dimana peranan masyarakat dan sekolah dapat dijadikan landasan pemikiran mengapa guru pembimbing sebagai suatu profesi kehadirannya sangat diperlukan oleh masyarakat maupun sekolah.

Lebih jelas lagi, bila kita melihat sejarah perkembangan konseling sebagai suatu profesi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, sebagai akibat adanya suatu perubahan dalam tatanan kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan. Dimana setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat, yang kemudian melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru, harapan-harapan baru dan keinginan-keinginan baru yang pada akhirnya menciptakan kondisi ekuilibrium dalam masyarakat. Hal-hal yang dapat membawa pada perubahan tersebut dapat dibagangkan seperti di bawah ini.

Perubahan (sosial, ekonomi, politik)	Disekuilibrium dalam masyarakat	Kebutuhan dan harapan baru
Guru pembimbing Suatu profesi	Guru pembimbing suatu keterampilan	Kelompok ilmuwan/ professional

Bagan 1.1. Perkembangan Profesi Guru Pembimbing (Supriadi, 1996)

Melihat kompleksitas dan keragaman permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah, maka pada tahun-tahun mendatang peranan guru pembimbing di sekolah perlu dan penting untuk ditingkatkan dalam rangka menjawab tantangan masyarakat untuk membantu mensukseskan proses belajar mengajar siswa di sekolah dan mengembangkan pribadi mereka dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia menghadapi era globalisasi dan keterbukaan

Melihat tuntutan dan tantangan masyarakat di masa mendatang, maka beban tugas guru pembimbing di sekolah akan semakin kompleks. Guru

pembimbing di sekolah bukan hanya menangani anak-anak yang bermasalah saja tetapi dapat memberikan wawasan yang lebih terbuka bagi para siswa dalam rangka membentuk pribadi mandiri yang dapat hidup dalam masyarakatnya.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pembimbing di sekolah, perlu adanya suatu pemikiran untuk lebih meningkatkan “performance” diri melalui program “in-service maupun pre-service training”, baik yang dilakukan pihak pemerintah secara langsung melalui wadah-wadah kegiatan profesi yang ada, sebagai dasar legitimasi seorang guru pembimbing di sekolah maupun pendidikan lanjutan tidak terstruktur dalam rangka memberikan bekal yang aktual dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, guru pembimbing di sekolah dalam lingkup wilayahnyapun harus mampu membuka diri, berkomunikasi, berkonsultasi, berbagi pengalaman dan informasi, untuk terus menerus mengaktualisasikan diri sesama rekan sejawat dalam suatu wilayah kerja bimbingan konseling di sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa terbatasnya layanan yang dilaksanakan dan kurangnya kualitas layanan yang diberikan berkaitan erat dengan kualitas guru pembimbing di sekolah.

Guru pembimbing di lapangan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja memerlukan bantuan dari suatu wadah kegiatan yang dapat memberikan masukan-masukan yang mereka perlukan. Dengan keterlibatan wadah kegiatan dalam pembinaan ke dalam terhadap anggotanya diharapkan adanya standar mutu layanan dari setiap anggotanya secara merata.



Sebagai wadah kegiatan profesi di tingkat Kabupaten/Kotamadya pemerintah telah membentuk MGP (Musyawarah Guru Pembimbing). MGP merupakan wadah kegiatan profesi non struktural yang memiliki nilai strategis dan berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. MGP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru pembimbing dari sejumlah sekolah. MGP secara spesifik berfungsi sebagai wadah kegiatan profesional guru pembimbing yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam bentuk perkumpulan atau sanggar-sanggar belajar, yang disebut "Sanggar Bimbingan dan Konseling" (SBK). Pengertian musyawarah disini mencerminkan kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk semua peserta dalam hal ini guru pembimbing. Peserta MGP adalah guru pembimbing negeri maupun swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. MGP sebagai wadah pembinaan keprofesionalan guru pembimbing, harus memiliki program kegiatan yang menjadi salah satu tolok ukur penilaian kelayakan keprofesionalan anggotanya yang tercermin pada visi, misi, ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan sehingga para anggota dapat merasakan peran aktif dan kebermaknaan dari MGP sebagai wadah pembina dan pengembangan profesi.

Peran aktif dan kebermaknaan MGP dapat terlihat dari pelaksanaan program kegiatan maupun pelatihan yang relevan dengan kebutuhan anggota MGP setempat. Hal ini cukup penting untuk dapat menyamakan kualitas kinerja dan mengangkat derajat profesionalan guru pembimbing. Disini berarti pengelola MGP harus mampu dan mau memberdayakan semua komponen MGP agar benar-benar dapat meningkatkan profesionalisme guru pembimbing dan pada akhirnya

dapat membentuk citra guru pembimbing yang positif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan data empirik, saat ini peran serta dan kebermaknaan MGP melalui program kerjanya belum optimal. Bahkan kalau boleh dikatakan belum mampu mengangkat derajat kebermaknaan MGP untuk dapat meningkatkan profesionalisme guru pembimbing di lapangan. Oleh karena itu patut dipikirkan “bagaimana memberdayakan MGP dengan program kegiatannya agar dapat memberikan makna yang positif dan optimal bagi peningkatan profesionalisme guru pembimbing?”.

B. Fokus Masalah

Perkembangan profesionalisme guru pembimbing di sekolah tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar ilmu, profesionalisme dan kepercayaan pengguna jasa layanan.

Dalam penelitian ini faktor yang diperhatikan adalah “keberadaan wadah kegiatan (MGP) dengan pengelola (manajemen) dan program kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pembimbing” dengan permasalahan: Penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan/pelatihan, kendala-kendala yang dialami sejak penyusunan program sampai dengan pelaksanaan program kegiatan/pelatihan, peningkatan profesionalisme dengan kriteria aspek komitmen profesi, upaya pengembangan diri, kemampuan menangani masalah, upaya pemberian bantuan, manajemen bimbingan konseling di sekolah,



instrumentasi bimbingan, penyelenggaraan bimbingan konseling dan harapan guru pembimbing terhadap MGP.

C. Pertanyaan Penelitian

Agar kegiatan penelitian ini dapat lebih terarah pada pemecahan masalah secara proposional, maka fokus permasalahan dapat dijabarkan dalam sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan program kegiatan/pelatihan MGP di susun?
2. Bagaimanakah pengelola MGP melaksanakan kegiatan /pelatihan yang telah direncanakan?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi pengelola MGP mulai dari penyusunan rencana sampai dengan pelaksanaan kegiatan/pelatihan?
4. Bagaimanakah upaya MGP memberdayakan dirinya untuk ikut meningkatkan profesionalisme guru pembimbing yang menjadi anggota?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan MGP beserta program kegiatannya cukup bermakna dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing”. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk:

1. Mengetahui pemahaman dan persepsi manajemen pengelola MGP dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pembimbing, terdiri atas:
 - a. Upaya yang dilakukan oleh pengelola MGP dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pembimbing.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi pengelola MGP dalam upaya peningkatan profesionalisme guru pembimbing.
2. Mengungkap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan MGP dalam rangka peningkatan profesionalisme guru pembimbing, terdiri atas:
 - a. Harapan guru pembimbing mengenai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan MGP dalam upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan guru pembimbing.
 - b. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan untuk menunjang kelancaran program kegiatan MGP dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pembimbing.
 - c. Kendala-kendala dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan MGP dalam upaya menambah wawasan dan keterampilan profesi guru pembimbing.
3. Mengetahui kebermaknaan MGP beserta program kegiatannya dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing.
4. Memberikan solusi sebagai alternatif bagi pengelola MGP dalam upaya meningkatkan peran serta MGP untuk peningkatan profesionalisme guru pembimbing di lapangan.

E. Asumsi Penelitian

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Latar belakang pendidikan guru pembimbing di lapangan yang bervariasi

2. Karena latar belakang pendidikan yang bervariasi inilah, membawa dampak kemampuan profesional yang beragam pula.
3. Sampai saat ini guru pembimbing di lapangan masih merasakan ketidakjelasan fungsi dan tugas di sekolah, karena di lapangan seakan terjadi pergeseran fungsi tugas yang seharusnya diemban (misalnya menjadi guru piket, menggantikan guru bidang studi meskipun sifatnya sementara dan lain sebagainya).
4. Kemajuan dan perkembangan IPTEK menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia.
5. Adanya perubahan kondisi sosial, politik, dan budaya di masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya yang pada akhirnya membawa akibat pada semakin kompleksnya masalah yang dihadapi siswa di sekolah.
6. Kurangnya pemerataan kesempatan guru pembimbing untuk mengaktualisasikan diri yang membawa dampak pada unjuk kerja guru pembimbing tidak seragam, kurang optimal dalam pemberian layanan bimbingan konseling di sekolah
7. Organisasi profesi pendukung seperti ABKIN dalam program kegiatannya secara nyata belum menjangkau tingkat kabupaten
8. Karena wadah organisasi profesi sebagai pembina belum bekerja secara optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kepedulian, penghayatan dan tanggung jawab profesi.
9. Adanya persepsi yang kurang baik terhadap kinerja guru pembimbing di lapangan.

10. Dari semua asumsi yang ada akhirnya bermuara pada pelaksanaan program MGP belum optimal, dirasakan MGP tidak berfungsi optimal.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional disajikan untuk menajamkan dan menyamakan persepsi tentang topik penelitian dan juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diungkap, sebagai berikut:

1. MGP dan program kegiatannya

MGP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesi guru pembimbing yang membawahi sejumlah sekolah dan memiliki komitmen melalui kegiatannya harus dapat meningkatkan kualitas guru pembimbing yang menjadi anggota binaannya yang dilakukan melalui tatap muka dengan teknik diskusi, studi kasus, informasi dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan layanan.

Pengertian musyawarah pada wadah MGP mencerminkan kegiatan dari, oleh dan untuk sesama peserta, dalam hal ini guru pembimbing, baik guru pembimbing tingkat SLTP atau SLTA negeri maupun swasta yang mengarah dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah (Prayitno, 1996: 2)

2. Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi, yang berarti suatu jabatan yang membutuhkan keahlian dari para anggotanya. Dianne H. Kommers (1972: 8) mengemukakan bahwa “...*the profession are set of occupations that have*

depeloved a very special set of norms deriving from their special role in society". Carr-Saunders merupakan ilmuwan sosial pertama yang menganalisis secara sistematis suatu pekerjaan beralih dan berkembang menjadi suatu profesi. Sedangkan Nugent (1981: 40) merangkum dari beberapa ciri profesi yang dikemukakan oleh para ahli, menyatakan bahwa : suatu jabatan dikatakan suatu profesi apabila para anggota yang tergolong ke dalam pekerjaan itu : (1) dapat merumuskan perannya secara jelas, (2) menyajikan pelayanan yang baik, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (4) memiliki kode etik, (5) mempunyai hak untuk menyelenggarakan pelayanan sebagaimana yang telah dirumuskan itu, dan (6) memiliki kemampuan untuk memantau penyelenggaraan praktek profesi tersebut dan profesionalisme menunjuk kepada sikap dan komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Supriadi, 1997).

Kinerja yang berkualitas profesional dimaksud sebagai perangkat perilaku nyata guru pembimbing dalam merealisasikan program bimbingan di sekolah sesuai dengan tuntutan profesi bimbingan yang mencakup unsur kualitas pribadi, manajemen bimbingan dan konseling serta penyelenggaraan layanan bimbingan (N. Solehuddin, 2000: 37). Aspek kinerja dapat dilihat dari 2 segi, yaitu (1) kualitas pribadi, mencakup aspek-aspek : (a) hubungan antar pribadi, (b) etos kerja dan komitmen profesional, (c) etika dan moral dalam berperilaku, serta (d) dorongan dan upaya pengembangan diri; (2) Kinerja dalam bidang manajemen

bimbingan dan konseling, mencakup aspek : (a) manajemen bimbingan di sekolah, dan (b) instrumentasi bimbingan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian profesionalisme menunjuk kepada sikap dan komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kualitas diri yang diwujudkan melalui kualitas kinerja yang dihasilkannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap teori minimal khususnya bagi pengembangan konsep bidang layanan bimbingan dalam rangka merumuskan format pembinaan peningkatan profesionalisme guru pembimbing di Indonesia yang selanjutnya dapat dikembangkan rumusan program kegiatan skala nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis terutama bagi pengelola MGP yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola dan anggota MGP di lapangan dalam rangka menentukan bentuk program kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja guru pembimbing yang menjadi anggota binaan MGP setempat, serta sebagai bahan informasi bagi pihak sekolah dalam memberi dukungan terhadap peningkatan layanan bimbingan di sekolah pada masa yang akan datang, sehingga terlihat adanya

suatu usaha pemberdayaan MGP untuk meningkatkan profesionalisme guru pembimbing secara optimal.

